



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB, DAN NTT

JALAN AIRPORT NGURAH RAI, TUBAN, BADUNG 80361
TELEPON (0361) 9357165, 9354204; FAKSIMILE (0361) 9354205; LAMAN kwbcbalinusra.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL kwbcbalintbntt@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-100/WBC.13/2025

Yth : Direktur Kepatuhan Internal
Dari : Kepala Kantor
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Konsep Awal Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT Tahun 2025
Tanggal : 17 Januari 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-27/BC.08/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Perencanaan Kinerja Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perencanaan kinerja untuk tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka menjalankan prinsip *continuous improvement* untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan kinerja pegawai di lingkungan DJBC;
2. Dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja tahun 2025 perlu dilakukan kegiatan penyusunan matriks penyelarasan kerangka kinerja tahun 2025 untuk menyelaraskan dokumen perencanaan, kinerja, dan penganggaran sebagai tindak lanjut dan implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Berdasarkan hal tersebut, berikut kami sampaikan konsep awal matriks penyelarasan kerangka kinerja Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
R. Fadjar Donny Tjahjadi



MATRIK PENYELARASAN KERANGKA KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA: KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB DAN NTT

Tujuan Jangka Pendek (Sasaran) Kantor: 1. Memberikan dukungan untuk peningkatan ekonomi regional dengan fasilitasi UMKM dan pariwisata untuk bisnis (MICE Tourism) 2. Melakukan pengawasan yang efektif terhadap barang larangan/pembatasan dan ilegal dalam rangka melindungi masyarakat dan industri 3. Menjaga citra positif organisasi melalui kinerja pelayanan yang optimal											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program Kerja	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu Anggaran	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1. Tujuan DJBC: Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif												
1.1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Presentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82,5%	Penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaku usaha berorientasi ekspor berupa sosialisasi dan asistensi terhadap pelaku usaha IKM	Kegiatan CUSTOMS JEMPOL (Customs Jemput Bola), yaitu kunjungan langsung ke Perusahaan dengan tujuan untuk melakukan asistensi dan bimbingan terkait fasilitas kepabeanan dan cukai, serta melakukan asistensi dan bimbingan kepada UMKM yang beroientasi ekspor.	Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur ekspor dan business matching	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Pemeriksaan	Rp10.277.000 [524111] Rp10.277.000		
							[4787] Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	[4787.AEF] Sosialisasi dan Diseminasi	[4787.AEF.001] Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	Rp7.872.000 [524111] Rp7.872.000		
2. Tujuan DJBC: Penerimaan Negara yang Optimal												
2.1	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	1. Sinkronisasi data ekspor antara DJBC, K/L, dan Pengguna Jasa: a. Analisa sektor/komoditi tertentu; b. Monitoring dan Evaluasi penerimaan setiap bulan 2. Joint Analysis dan <i>Secondment</i> 3. Peningkatan kualitas penetapan/ putusan keberatan 4. Pelaksanaan evaluasi hasil putusan keberatan 5. Peningkatan kompetensi penanganan keberatan dengan mengikuti berbagai pelatihan (workshop, diklat, FGD) 6. Pelaksanaan sosialisasi kepada Pengguna Jasa 7. Penguatan fungsi kegiatan audit kepabeanan dan cukai: a. Perencanaan audit yang optimal	a. Monitoring dan evaluasi penerimaan setiap bulan b. Peningkatan SDM penanganan keberatan, audit, dan penelitian ulang. c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat jaringan pada Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kantor.	Realisasi penerimaan bulanan tidak mencapai trajectory atau target yang ditetapkan	[4789] Pengawasan dan Penegakan Hukum	[4789.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	[4789.BIG.001] Laporan Hasil Audit	Rp 37.431.500 [524111] Rp37.431.500		
							[4787] Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	[4787.FAC] Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	[4787.FAC.006] Pembinaan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Rp18.135.000 [524111] Rp18.135.000		
							[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	Rp45.680.000 [524111] Rp45.680.000		
							[4788] Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	[4788.BCE] Penanganan Perkara	[4788.BCE.002] Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai	Rp7.020.000 [521219] Rp4.020.000 [522151] Rp3.000.000		

				b. Implementasi pelaksanaan kegiatan audit c. Evaluasi yang optimal atas audit yang telah dilaksanakan. 8. Penguatan fungsi penelitian ulang: a. Implementasi tahap perencanaan dalam rangka penentuan objek/tema Penelitian ulang; b. Implementasi pelaksanaan kegiatan penelitian ulang c. Evaluasi yang optimal atas penelitian ulang yang telah dilaksanakan; d. Peningkatan kompetensi <i>auditor</i> dan pemeriksa penelitian ulang dengan mengikuti berbagai pelatihan (workshop, diklat, FGD); e. Optimalisasi Penerimaan melalui Intensifikasi Penelitian Ulang dengan pemanfaatan TIK. 9. Optimalisasi Pengelolaan Perangkat Jaringan.							
2.2	Sinergi Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Persentase efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepastian dan cukai	81%	Penyidikan tindak pidana kepastian, cukai, dan/atau TPPU	1. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan; 2. Pemanggilan; 3. Penetapan Tersangka; 4. Penangkapan; 5. Penahanan; 6. Penggeledahan; 7. Penyitaan; 8. Pemeriksaan; 9. Pemotretan dan/atau perekaman melalui media audiovisual; 10. Pengambilan sidik jari orang; 11. Pemberian tanda pengaman; 12. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. Gelar Perkara; 14. Penyelesaian berkas perkara; 15. Pelimpahan berkas perkara; 16. Penghentian Penyidikan; dan/atau a. Administrasi Penyidikan.	- Kurangnya kompetensi penyidik dalam menggali pemenuhan unsur pasal pelanggaran pidana; - Penyidik menghadapi kesulitan/kendala dalam mencari dan mengumpulkan bukti; - Administrasi penyidikan tidak lengkap; - Adanya gugatan praperadilan; - Koordinasi dengan penuntut umum tidak efektif.	[4789] Pengawasan dan Penegakan Hukum	[4789.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	[4789.BIG.004] Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	Rp14.620.973 [524111] Rp14.620.973	

		Persentase efektivitas pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal	86%	Optimalisasi pengawasan produksi dan peredaran BKC HT ilegal	1. Pengumpulan dan pengolahan Informasi; 2. Cyber crawling BKC Ilegal pada e-commerce; 3. Pemantauan perkembangan APHT; 4. Pemetaan jalur distribusi BKC HT Ilegal; 5. Pengawasan Bersama dengan Pemda setempat; dan/atau 6. Pelaksanaan Operasi Gempur.	- Informasi tidak valid; - Analisis tidak tepat; - Resistensi dalam proses penindakan.	[4789] Pengawasan dan Penegakan Hukum	[4789.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	[4789.BIG.004] Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	Rp29.874.353 [524111] Rp29.874.353	
2.3	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna Jasa	3,1 (skala 4)	Penyusunan rencana aksi guna peningkatan kepuasan pengguna Jasa	Asistensi pengisian SKPJ kepada pengguna jasa	Isian SKPJ oleh pengguna jasa tidak valid	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp2,718,948,000 [523111] Rp 413,216,000 [523112] Rp 48,000,000 [522113] Rp 84,000,000 [522141] Rp 401,008,000 [523121] Rp 639,140,000 [521111] Rp1,133,584,000	
							[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal	[4695.EBB.002] Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp741,283,000 [532111] Rp741,283,000	
							[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal	[4695.EBB.005] Gedung/Bangunan	Rp6,870,984,000 [533121] Rp6,870,984,000	
2.4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	84%	Melaksanakan asistensi serta Monitoring dan evaluasi kepada pengusaha Barang Kena Cukai	1. Monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan Pengusaha BKC. 2. Asistensi terkait peraturan-peraturan terbaru	1. Adanya Pelanggaran Pengusaha BKC 2. Kurangnya pembinaan pengusaha BKC	[4787] Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	[4787.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	[4787.BIG.001] Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai	Rp6.139.000* [524111] Rp6.139.000	
							[4787] Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	[4787.FAC] Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	[4787.FAC.006] Pembinaan Di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	Rp18.135.000 [524111] Rp18.135.000	
2.5	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)	Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/FGD/ Coffee Morning atau kegiatan lainnya kepada masyarakat/ pengguna jasa/ asosiasi perhotelan dan/atau travel agent	1. Melaksanakan edukasi dalam bentuk sosialisasi 2. Pemuatan informasi kepabeanaan dan cukai pada media sosial 3. Database LIMOSIN (Little Improvements More Information)	Penyampaian informasi secara daring tidak berjalan dengan baik, dikarenakan hambatan kualitas jaringan dalam penggunaan MS Teams bagi peserta	[4787] Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	[4787.AEF] Sosialisasi dan Diseminasi	[4787.AEF.001] Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	Rp43.680.000* [521211] Rp33.280.000 [522141] Rp5.000.000 [522151] Rp5.400.000	

2.6	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	82%	1. Kegiatan Pengawasan NPP 2. Kegiatan Intelijen dan Penindakan di bidang kepabeanaan dan cukai 3. Penelitian dugaan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai 4. Penanganan barang hasil penindakan 5. Pemusnahan barang hasil penindakan 6. Pengelolaan sarana operasi pengawasan	1. Kegiatan intelijen dalam rangka pendeteksian dini dan penindakan terhadap Pelanggaran terkait NPP; dan/atau operasional Pengawasan dengan menggunakan K-9. 2. Kegiatan intelijen dalam rangka pendeteksian dini atas pelanggaran di bidang kepabeanaan cukai; 3. Patroli darat berupa pengamatan terhadap sarana pengangkut, barang, atau tempat yang diduga terkait pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai; dan/atau 4. Operasi penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan di bidang kepabeanaan dan cukai 5. Pemanggilan/permintaan keterangan saksi dan/atau pelaku yang terkait dengan dugaan Pelanggaran; 6. Pengumpulan dan penelitian surat-surat/dokumen-dokumen yang terkait dengan dugaan Pelanggaran; 7. Pencacahan dan analisis Barang Hasil Penindakan; 8. Penelitian dan analisis terhadap Pelanggaran; 9. Pelaksanaan gelar perkara untuk memperoleh pendapat secara lebih komprehensif; 10. Pengajuan permintaan audit investigasi dalam rangka mendukung proses penelitian dalam hal diperlukan; 11. Pembuatan kesimpulan hasil penelitian dugaan Pelanggaran;	1. Kegiatan Pengawasan NPP tidak efektif. 2. Kegiatan intelijen tidak efektif; 3. Kegiatan patroli darat dan operasi penindakan tidak efektif. 4. Kurangnya kompetensi pegawai dalam melakukan pengambilan keterangan saksi dan/atau pelaku yang terkait dengan dugaan pelanggaran; 5. Kurangnya kompetensi pegawai dalam melakukan analisis terhadap pelanggaran dan barang hasil penindakan; 6. Surat-surat/dokumen-dokumen yang terkait dengan dugaan pelanggaran tidak lengkap 7. BHP tidak lengkap sesuai berkas penindakan; 8. tempat penyimpanan BHP kurang/tidak memadai; 9. BHP hilang	[4789] Pengawasan dan Penegakan Hukum	[4789.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	[4789.BIG.004] Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	Rp219.664.468 [521219] Rp31.450.000 [522191] Rp31.453.000 [524111] Rp84.761.468 [522141] Rp72.000.000	
							[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	[4695.CCF] OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	[4695.CCF.001] Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai	Rp701.200.000 [521219] Rp25.000.000 [523121] Rp11.200.000 [523191] Rp280.000.000 [523199] Rp385.000.000	
							[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp49.900.000 [523111] Rp46.100.000 [522119] Rp 3.800.000	
							[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	[4695.EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal	[4695.EBB.002] Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp139,750,000 [532111] Rp139,750,000	

					12. Penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara; dan/atau 13. Penelitian terhadap surat permohonan penyelesaian perkara di bidang cukai berupa tidak dilakukan penyidikan 14. Pencacahan BHP; 15. Penyimpanan BHP; 16. Penyelesaian BHP; 17. Penyisihan BHP; 18. Pelelangan BHP; 19. Penatausahaan BHP; 20. Penetapan BDN; 21. penetapan BMMN; dan/atau 22. usulan peruntukan pemusnahan BMMN. 23. Penerbitan Keputusan persetujuan peruntukan pemusnahan BMMN dari DJKN; 24. Pembentukan panitia pemusnahan; 25. Pengangkutan barang hasil penindakan; 26. Pengawalan BHP ke tempat pemusnahan; 27. Pemusnahan BHP; dan/atau 28. Administrasi pemusnahan 29. pengoperasian sarana operasi; 30. pemeliharaan sarana operasi; dan 31. Administrasi sarana operasi	10. Peralatan pemusnahan tidak/kurang memadai; 11. Biaya pemusnahan tinggi. 12. Sarana operasi rusak/tidak berfungsi; 13. Sarana operasi hilang.					
		Persentase efektivitas patroli laut	75%	Pelaksanaan operasi patroli laut	Pengawasan untuk menjamin terpenuhinya hak negara dan dipatuhinya ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta tujuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah perairan dalam Daerah Pabean.	- Kondisi cuaca; - Kondisi kapal patroli yang tidak/kurang memadai; - Keselamatan kapal patroli dan satuan tugas patroli laut; - Resistensi dari pihak lain.	[4789] Pengawasan dan Penegakan Hukum	[4789.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	[4789.BIG.004] Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	Rp7.989.706 [524111] Rp7.989.706	
3. Tujuan: Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif dan efisien											
3.1	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian	82%	1. Membuat perencanaan program PRKC dan program pendukung PRKC berkelanjutan yang berkualitas 2. Penyelesaian program PRKC	Menyampaikan ND Permintaan pengisian capaian setiap triwulan	Keterlambatan penyelesaian milestone PRKC dari target yang ditetapkan	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	-	

	yang efektif dan efisien	program PRKC berkelanjutan		yang wajib dilaksanakan (cascade) berupa program pendukung 3. Inisatif strategis organisasi dan Program kerja mandiri pendukung PRKC yang telah disusun dan direncanakan 4. Melaksanakan kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil monitoring terhadap program PRKC yang telah disusun dan direncanakan.							
		Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,1 (skala 4)	- Tindak lanjut kajian 2024 ke Atambua - Kajian 2025 1. Melaksanakan rapat pembahasan kajian di bidang kepabeanan dan cukai 2. Menyampaikan Rencana Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal. 3. Melaksanakan penelitian dan analisi dalam rangka penyusunan naskah kajian. 4. Menyampaikan Naskah Kajian kepada Tenaga Pengkaji. 5. Melaksanakan presentasi dan pembahasan kajian di bidang kepabeanan dan cukai yang telah dikirim.	1. Penyampaian Kajian kepada tenaga pengkaji yang berkualitas	Perumusan kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai melewati batas waktu dan tidak memenuhi kualitas yang ditetapkan	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	Rp39.443.000 [524111] Rp39.443.000	
3.2	Pemantaua n dan pengendali an internal yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	85,5%	Penegakan Kepatuhan Internal a. Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis DJBC b. Pemantauan Pengendalian Intern c. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai d. Pembinaan Mental Pegawai e. Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat f. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas a. Investigasi Internal	Menindaklanjuti Rekomendasi APF	Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional (APF) tidak ditindaklanjuti	[4698] Pengelolaan Risiko, Pengendalia, dan Pengawasan Internal	[4698.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal	[4698.EBD.001] Rekomendasi Kepatuhan Internal	Rp9.076.818 [524111] Rp9.076.818	
		Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan	83%	1. Edukasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepatuhan Internal a. Peningkatan kompetensi pegawai Unit Kepatuhan Internal b. Penerapan Pengendalian Intern	Mengecek aplikasi pengaduan secara berkala Edukasi dan Bimbingan teknis terkait integritas	Adanya pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti Adanya OTT, pungli, dan korupsi yang dilakukan pegawai	[4698] Pengelolaan Risiko, Pengendalia, dan Pengawasan Internal	[4698.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal	[4698.EBD.001] Rekomendasi Kepatuhan Internal	Rp5.067.182 [524111] Rp5.067.182	

		kepatuhan internal		c. Penerapan Budaya Kinerja d. Program kerja EPG 2. Evaluasi di Bidang Kepatuhan Internal a. Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern DJBC b. Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan <i>Fraud Risk Scenario</i> c. Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas d. Evaluasi Pelaksanaan Investigasi Internal e. Pengelolaan Survei Organisasi Evaluasi Pengelolaan Kinerja		Bea Cukai yang ditemukan oleh Aparat Penegak Hukum					
3.3	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	1. Monitoring dan evaluasi pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pegawai	Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) sebulan 2 kali	Rendahnya keikutsertaan pegawai dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP)	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	[4696.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp 50.000.000 [521119] Rp 50.000.000	
				a. Implementasi pemberian penghargaan			[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	Rp 8.000.000 [522151] Rp 8.000.000	
				b. P2KP Tahunan terkait mekanisme pemberiam penghargaan			[4697] Pengelolaan Organisasi dan SDM	[4697.EBC] Layanan Manajemen SDM Internal	[4697.EBC.001] Pengembangan SDM	Rp 31.785.000 [524111] Rp 31.785.000	
				c. Permintaan usulan pemberian penghargaan dari tiap-tiap Unit Eselon IV							
				d. Pembahasan dan penilaian usulan pegawai penerima penghargaan							
				e. Pemberian tanda penghargaan oleh Kepala Kantor							
				f. Pengusulan pegawai penerima penghargaan yang lebih tinggi							
				g. Penggunaan Koper Disiplin sebagai pertimbangan dalam pemberian penghargaan							

		Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko	81%	1. Membuat Pernyataan Komitmen MR, KEP Struktur MR, Piagam MR dan Dokumen Pendukung 2. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan risiko 3. Membuat laporan Pemantauan Risiko 4. Mengidentifikasi Risiko Probis 5. Melaksanakan penilaian MR (TKPMR)	Melaksanakan penanganan risiko setiap bulan	Data manajemen organisasi yang tidak terupdate	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	Rp 20.000.000 [524111] Rp 20.000.000	
		Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	83%	1. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi. 2. Pengelolaan Kualitas Penyusunan IKU Organisasi dan IKI Pegawai. 3. Pembuatan Database terkait Perhitungan capaian IKI. 4. Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK), Risalah rapat , Matriks Tindak Lanjut, Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat. 1. Tindak lanjut pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan pimpinan UPK yang tercantum pada matriks tindak lanjut yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan. Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu dan output yang jelas yang diberikan oleh pimpinan Dialog Kinerja Organisasi dalam rangka perbaikan kinerja organisasi.	1. Melakukan update secara berkala Data manajemen organisasi 2. Melakukan asistensi terhadap seluruh pejabat dan pegawai terkait dengan strategi dalam penyusunan IKI yang berkualitas 1. Penyusunan Database IKI merupakan produk perhitungan IKI yang otomatis sesuai dengan formula yang ada pada manual IKU nya.	Data manajemen organisasi yang tidak terupdate	[[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	Rp20,000,000 [524111] Rp20,000,000	
3.4	Pengelolaan keuangan	Indeks kualitas	100	1. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	1. Penyusunan Matriks penyalarsan antara IKU dan Anggaran	Rendahnya kualitas anggaran	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal	[4695.EBD.002] Laporan Keuangan Unit	Rp14.144.000 [524111] Rp14.144.000	

	BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	pelaksanaan anggaran		2. Monitoring dan Evaluasi Belanja. 3. Penyusunan Laporan Keuangan 4. Pembinaan Satuan Kerja di bidang anggaran	2. Melakukan bimbingan teknis belanja satker di Lingkungan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT		[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal	[4695.EBB.005] Gedung/Bangunan	Rp6,870,984,000 [533121] Rp6,870,984,000	
							[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	Rp50,000,000 [524111] Rp50,000,000	
							[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	[4696.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp208.280.000 [521114] Rp 12.000.000 [521115] Rp 70,440,000 [521119] Rp 24,000,000 [521811] Rp 44,400,000 [521832] Rp 24,000,000 [521113] Rp 33.440.000	



Ditandatangani secara elektronik

Yacobus Agus Wahyudiono

